

SEKULARISME DAN POLITIK DI ERA TURKI MODERN**Resy Noni Mardiantanti¹, Nisa Rahmania², Alfi Dynara Putri³, Erjati Abbas⁴**^{1,2,3,4}UIN Raden Intan Lampungresynoni@gmail.com¹, sarah.mania24@gmail.com², alfidinaraputri45@gmail.com³,
erjati@radenintan.ac.id⁴**Abstrak**

Turki adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan sekuler. Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden Turki, dalam membuat ideologi sekulernya pada tanggal 3 Maret 1924, ia secara resmi menghapuskan *Khalifah* di bumi Turki. Mustafa Kemal membangun ideologi sekuler untuk melahirkan peradaban baru. Karena itu jika Turki ingin maju dan modern, maka ia harus mengesampingkan agama. Dinamika perubahan politik Turki mengalami fluktuasi dan terus mengalami gejolak. Hal tersebut dapat ditelisik pada saat pergantian sistem pemerintahan yang bermula dari monarki menuju Republik. Hingga proses pemerintahannya menganut sekuler. Mustafa Kemal kemudian dijadikan sebagai tokoh penting dalam mengubah hampir seluruh alur pemerintahan serta berbagai kebijakan-kebijakan yang membuat Turki menjadi Negara sekuler. Adapaun dalam penelitin ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis teks dan informasi yang terkait dengan kajian. Sumber data penelitian ini adalah buku ilmiah, jurnal, hasil riset ilmiah, hasil kajian ilmiah dan sebagainya.

Kata Kunci: Sekularisme, Politik, Turki, Mustafa Kemal Atatürk**Abstract**

Turkey is one of the countries that adheres to a parliamentary and secular government system that initiated by Mustafa Kemal Atatürk in developing secular ideology in Turkey On March 3, 1924. He formally abolished the Caliph on the earth of Turkey. For Mustafa Kemal Atatürk, the interference of Islam in various political activities, has brought decline of Islam. Mustafa Kemal promoted secular ideology to create a new civilization. The dynamics of Turkish political change fluctuate and continue to experience turmoil. This can be investigated at the time of the change in the government system that started from the monarchy to the Republic. Until the process of government embraced secular. Mustafa Kemal later became an important figure in changing almost the entire flow of government and various policies that made Turkey a secular state. The Meanwhile, in this research the author uses a type of library research with a text analysis approach and information related to the study. The data sources for this research are scientific books, journals, scientific research results, scientific study results and so on.

Keywords: *Secularisme, Politics, Turkey, Mustafa Kemal Atatürk*

PENDAHULUAN

Pada 1922, kesultanan Ottoman dihapuskan dan pada tahun berikutnya yaitu pada 19

Oktober 1923, Negara Ottoman dideklarasikan sebagai Republik Turki sesuai dengan keputusan Majelis Nasional Agung. Setelah merdeka, walaupun negara turki merupakan negara republik dan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden yang terpilih.¹ Pada saat itu jabatan khalifah masih ada dan diduduki oleh Abdul Majid. Karena hal tersebut, pada saat itu menyebabkan diambilnya keputusan baru, yaitu penghapusan jabatan khalifah, pada 1924 yang melepaskan Republik Turki dari gambaran dualisme.² Meski pun begitu kedaulatan negara belum memiliki gambaran tentang kedaulatan rakyat secara jelas. Hal ini disebabkan dalam konstitusi, Islam masih merupakan agama negara, artinya kedaulatannya adalah syariat, bukan di tangan rakyat. Sehingga pada 1928, Mustafa Kemal Atatürk memasukkan prinsip sekularisme ke dalam konstitusi negara dimana agama tidak lagi berada dalam sistem pemerintahan.Republik. Mustafa Kemal Atatürk terlihat sangat antusias untuk mengubah Republik Turki menjadi negara sekular, sehingga walaupun belum menjadi negara sekular, Atatürk sudah mulai menghilangkan institusi keagamaan dalam pemerintahan sebelum tahun peresmiannya. Turki resmi menjadi negara sekular pada 1936.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini adalah analisis teks dan informasi yang terkait dengan kajian. Sumber data penelitian ini adalah buku ilmiah, jurnal, hasil riset ilmiah, hasil kajian ilmiah dan sebagainya. Kelan menyatakan bahwa, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari data variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Awal Munculnya Turki Mordern

¹ Guillermo O'Donnel et.al (ed), *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan* (Cet. 1:Jakarta LP3ES, 1992), h. 268-269.

² Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IX: Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 153.

³Dankwart A. Rustow, "Political Parties in Turkey: An Overview", dalam Metin Heper dan Jacob M. Landau (Eds.), *Political Parties and Democracy in Turkey* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 1991), h. 13.

⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

Pada periode modern, Turki tidak hanya mengalami perubahan dalam satu sistem saja tetapi terdapat beberapa perubahan yang diistilahkan dengan adanya tiga pembagian sistem politik yaitu Turki Lama, Transisi, dan Turki Modern (Sawaludin, 2017). Sebelum memasuki fase Turki Lama, sebelumnya terdapat revolusi pemerintahan yang merupakan penanda bagi runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani yang bertepatan pada Perang Dunia I. Namun, sebelum itu Kesultanan Turki Utsmani telah mengalami kemunduran sejak abad ke 17 tepatnya ketika negara-negara Eropa mulai muncul sebagai negara-negara Eropa Barat yang berkembang pesat di dunia. Hal tersebut mempengaruhi Turki untuk melakukan rekonstruksi pemerintahan dengan sesuatu yang baru. Namun dengan adanya usaha untuk mengadakan perubahan, Turki terpecah menjadi tiga golongan. Golongan pertama disebut juga sebagai golongan Barat yang mana ingin mengadopsi peradaban Barat sebagai dasar pembaharuan negara. Golongan selanjutnya adalah golongan Islamis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar pembaharuan Turki. Golongan yang terakhir adalah golongan nasionalis yang tidak ingin kedua hal dari golongan-golongan yang sebelumnya disebutkan menjadi dasar pembaharuan

Kesultanan Utsmani (Turki Utsmani) lebih tepatnya berakhir pada abad 20 dimana terjadi peristiwa kekalahan menghadapi tentara sekutu yang mana pada saat itu tentara Turki Utsmani bergabung dengan tentara Jerman. Dikala Turki mengalami masa-masa sulit, Mustafa Kemal muncul dengan menyelamatkan Turki dari kehancuran serta berhasil memproklamkan Negara Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Bersamaan dengan resminya Turki menjadi negara Republik, Mustafa Kemal Attaturk terpilih sebagai Presiden pertama Negara tersebut. Sebelum menjadi presiden Turki yang pertama, Mustafa Kemal berperan dalam membentuk Dewan Perwakilan Nasional dan beliau menobatkan dirinya untuk menjadi ketuanya. Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan konsep yang memisahkan antara khilafah dengan Pemerintahan. Sehingga pada masa itu ada dua pemerintahan yaitu pemerintahan Khalifah di Istanbul dan Pemerintah Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan Mustafa Kamal Attaturk untuk menjadi ketua parlemen dan diharapkan dapat menyelesaikan kondisi krisis yang terjadi di Turki saat itu. Kemudian setelah resmi menjadi ketua parlemen, Mustafa Kemal mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah system khilafah menjadi Republik dengan dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh parlemen.

Pada tanggal 3 Maret 1924 setahun setelah terpilihnya Mustafa Kemal Attaturk sebagai Presiden Turki, ia menghapuskan system kekhilafahan. Pembaharuan yang dilakukan oleh presiden tersebut salah satunya adalah tentang sekularisme. Upaya sekularisasi ini dilakukan

dengan cara memisahkan agama dari kegiatan berpolitik yang didalamnya terkandung pembebasan institusi-institusi negara, struktur hukum, bahkan pendidikan dari pengaruh Agama (Syafe'i, 2010). Sistem politik pada masa Mustafa Kemal disebut dengan istilah Kemalis yang merupakan perjuangannya sebagai pelopor transformasi sistem politik di Turki. Seperti yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya, Partai Rakyat Republik (PRR) menjadi satu-satunya partai yang berkuasa di Turki. Kekuasaan PRR pada saat itu bahkan tidak dapat digoyahkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kurdi juga para emigrant (Zurcher, 2003; Machmudi, 2013). Pada masa ini Mustafa Kamal Attaturk sebagai pemimpin Turki mengadakan reformasi besar-besaran dalam tatanan kehidupan untuk menjadikan Turki sebagai negara sekuler yang bersifat modern.

B. Mustafa Kemal Atatürk Sebagai Pendiri Turki Modern

Mustafa Kemal Atatürk lahir di Salonika, salah satu kota besar di Yunani, pada 1881, dan meninggal dunia pada 1938 di Istanbul.⁵ Ayahnya bernama Ali Reza, merupakan seorang pegawai pada salah satu instansi pemerintahan. Ibunya bernama Zubaede Khanin, merupakan seorang wanita yang memiliki perasaan yang halus dan rajin beribadah. Ibunya menginginkan Kemal menjadi orang yang taat beragama, mengikuti jejak keluarga, yaitu menjadi seorang *hafiz* atau *hoja*.⁶ Orang tua Kemal memasukkannya ke sekolah madrasah, tetapi karena ia tidak senang bersekolah disana dan sering dianggap melawan guru, akhirnya ia pindah ke sekolah modern di Salonika. Selanjutnya ia masuk ke sekolah militer menengah dengan usahanya sendiri. Ia tamat sekolah pada usia 14 tahun dan melanjutkan ke sekolah latihan militer dan diberi pangkat kapten.⁷

Saat di Istanbul, Mustafa Kemal dan teman-temannya membentuk perkumpulan rahasia yang menerbitkan tulisan-tulisan tentang kritikan terhadap pemerintahan sultan. Kemudian ia dan teman-temannya ditangkap dan dipenjarakan dalam beberapa bulan. Setelah bebas, ia diasingkan ke Suria bersama Ali Fuad, bergabung dengan pasukan penumpas pemberontakan di Damaskus. Pada 1906, ia juga mendirikan kelompok oposisi dibawah tanah. Setahun kemudian, Kemal dipindahkan ke Salonika dan membentuk perkumpulan persatuan. Dalam konferensi perkumpulan, ia menggabungkan diri dengan *Ve Hunyet* (Tanah Air dan

⁵Edward J. Erickson, *Mustafa Kemal Atatürk*, (London: Osprey Publishing, 2013), h. 9.

⁶H.A. R. Gibb, "Atatürk, Mustafa Kemal", dalam *The Encyclopedia of Islam*, I, (Leiden: Koninklijke Brill, 1989), h.85.

⁷Harun Nasution, *op. cit*, h. 143.

Kemerdekaan) menjadi sebuah perkumpulan.⁸ Mustafa Kemal menyatakan bahwa agar konstitusi dan negara dapat dipertahankan maka diperlukan tentara kuat di satu pihak dan partai kuat di lain pihak, tetapi tidak dapat digabungkan. Perwira seharusnya lebih memilih untuk tinggal dalam tentara dan keluar dari partai atau tinggal dalam partai dan keluar dari tentara. Pernyataan tersebut akhirnya membuat Mustafa Kemal dan Ali Fethi dibuang ke Sofia. Kemal ditugaskan sebagai atase militer. Pengalaman ini menjadi bekalnya, ia menjadi seseorang yang mengenal peradaban Barat dan belajar tentang pemerintahan parlementer secara langsung. Setelah perang dunia I, ia dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal ditambah gelar *pasya*⁹ karena keberaniannya dan kecakapannya di perbatasan Kaukasus dan Gallipoli.

Pada 1919, Mustafa Kemal dan para pemberontak membentuk suatu kader militer tangguh untuk kekuatan tentara nasional yang ingin membentuk suatu negara nasional Turki merdeka. Pada 1920, Mustafa Kemal mendirikan *National Assembly* (Dewan Nasional) di Ankara. Ia menyatakan bahwa praktik kenegaraan paling mendasar adalah pemerintahan rakyat. Setahun berikutnya dalam *law of fundamental organization*, dikatakan bahwa penguasa merupakan perwakilan rakyat. Mustafa Kemal dan teman-temannya bergerak secara terusmenerus dan perlahan-lahan mengetahui bahkan menguasai situasi. Kemal mengadakan serangkaian informasi radikal. Akhirnya sekutu dengan terpaksa mengakui keberadaan Kemal dan teman-temannya sebagai penguasa *defacto* dan *dejure* di Turki dengan penandatanganan perjanjian *Lausanne* pada 1923. Saat itulah kemerdekaan Turki diakui secara internasional. Mustafa Kemal menjadi presiden pertama Republik Turki. Ia ingin mengubah identitas Turki menjadi negara modern yang lebih maju dan dapat bersaing dengan negara Barat seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Ia mengubah semua tatanan politik, ekonomi dan sosial yang dapat membawa Turki menjadi negara modern.

Setelah Turki menjadi negara sekular, Islam tetap diakui sebagai agama mayoritas penduduknya, tetapi jelas-jelas dipisahkan dengan negara. Negara bukan agama.¹⁰ Pemahaman tersebut membawa beberapa perubahan yang terjadi di Turki. Mustafa Kemal diberi gelar Atatürk pada 1934. Setahun setelahnya, ditetapkan enam prinsip Kemalisme¹¹ yaitu republikanisme, populisme, nasionalisme, sekularisme, reformisme, dan statisme.¹²

⁸*Ibid.*, h. 144.

⁹*Ibid.*, h. 145.

¹⁰Justin McCarthy, "Who are The Turks? (A Manual for Teachers)", (*The American Forum for Global Education*, 2003), h. 6.

¹¹Niyazi Berkes, *Development of Secularism in Turkey* (MC. Gill University Press, 1964), h. 463.

¹²A. Baran Dural, *His Story: Mustafa Kemal and Turkish Revolution* (Lincoln: iUniverse, 2007), h. 147.

Republikanisme Kemalis merupakan paham tentang penghapusan sistem pemerintahan monarki kekhalifan Ottoman dan menggantinya dengan asas negara hukum, pemerintahan tertinggi (eksekutif), dan kebaikan sipil. Untuk melindungi asas tersebut maka ditanamkan realisasi identitas nasional Turki modern pada rakyat. Kemalisme hanya mengakui rezim Republik untuk Turki. Kemalisme percaya bahwa hanya rezim republik yang terbaik dapat mewakili keinginan rakyat.¹³

Populisme merupakan pilar kedua di Republik Turki. Paham ini merupakan revolusi social, yang dipimpin oleh para elit, ditujukan untuk memindahkan kekuatan politik kepada kewarganegaraan. Reformasi Kemalis membawa perubahan revolusioner dalam status perempuan melalui penerapan kode Western hokum di Turki, khususnya KUH Perdata Swiss. Selain itu, perempuan menerima hak untuk memilih pada 1934. Atas nama Populisme, Atatürk menyatakan bahwa para penguasa Turki dahulunya adalah rakyat biasa. Rasa bangga dikaitkan dengan kewarganegaraan ini akan memicu psikologis yang dibutuhkan agar rakyat lebih bekerja keras untuk mencapai rasa persatuan dan identitas nasional. Nasionalisme Kemalis tidak rasis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemerdekaan Republik Turki dan membantu perkembangan politik Turki. Atatürk menyatakan bahwa ideologi tertinggi yang harus dipegang oleh bangsa Turki adalah administrasi dan pertahanan bangsa, kesatuan nasional, kesadaran nasional, dan budaya nasional. Pernyataan ini menguatkan posisi Nasionalisme Kemalis.¹⁴

Sekularisme Kemalis tidak hanya berarti pemisahan negara dan agama, tetapi juga pemisahan agama dari urusan pendidikan, budaya, dan hukum. Kemerdekaan pikiran dan independensi institusi juga dipisahkan dari dominasi pemikiran agama. Dengan demikian, revolusi Kemalis juga revolusi sekular. Prinsip sekularisme Kemalis tidak menganjurkan ateisme. Prinsip ini berlawanan dengan Islam yang menghambat perkembangan suatu Negara menurut Atatürk. Reformisme atau Revolusionisme adalah prinsip modernisasi dengan mengganti lembaga tradisional dengan lembaga-lembaga modern. Semua harus berlangsung secara modern, sehingga paham tradisional tersingkirkan. Prinsip ini menyokong perubahan sosial menuju masyarakat modern. Statisme Kemalis memiliki arti bahwa negara harus mengatur aktivitas ekonomi secara umum dan memanfaatkan bidang-bidang yang belum diambil oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk dikelola jika dibutuhkan. Dengan penerapan prinsip statisme, negara tidak hanya sebagai sumber prinsip kegiatan ekonomi, tetapi juga

¹³*Ibid.*, h. 149.

¹⁴*Ibid.*, h. 151-155.

sebagai pemilik kegiatan industri utama negara.¹⁵

C. Sekularisme Di Era Turki Modern

Sekularisme merupakan suatu pemahaman atau ideologi bahwa sebuah institusi, badan, atau negara harus dipisahkan dari agama. Ide-ide sekularisme yang menuntut ketiadaan campur tangan atau intervensi agama dalam dunia politik. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip dasar agama Islam. Masyarakat Eropa dan pihak Barat memandang bahwa Islam merupakan sekelompok fundamentalisme yang hanya akan menghambat terjadinya modernisasi. Islam yang diasosiasikan dengan hal negatif menjadi faktor penting dibalik terbentuknya sekularisme *Laicism* (proses pemaksaan oleh hukum negara, propaganda pemerintah, dan media untuk membentuk masyarakat sekular agar menyetujui jika permasalahan agama menjadi kepentingan privat) di Eropa dan sekularisme *Judeo-Christian* (agama menjadi sumber pembentukan perpolitikan atau kebijakan sebuah negara, namun agama tidak pernah melakukan intervensi terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah). di Amerika Serikat.¹⁶

Turki modern juga dipengaruhi oleh paradigma modernisasi abad kedua puluh yang ingin menghilangkan pengaruh Islam yang pernah tertanam dalam gerakan reformasi abad kesembilan belas. Sejarah sekularisasi Ottoman digambarkan dalam paradigma modernisasi ini sebagai proses dialektis yang ditandai dengan “perjuangan elit tercerahkan (birokrat Tanzimat, Utsmani Muda, Turki Muda, dan para Kemalis) yang terbuka untuk ide-ide Barat dengan perwailan dari nilai-nilai tradisional dan sebagian besar agama,” hingga berpuncak pada Republik sekular.¹⁷

Munculnya paham sekularisme dan penanamannya di Turki dipengaruhi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Menurut pahamnya, sekularisme adalah kekuasaan negara yang didesain dapat mengontrol agama, memasukkan agama ke dalam ranah pribadi dan menyingkirkan agama dari ranah publik.¹⁸ Sejak tahun 1922 hingga 1935, sistem sekulerisme ini diterapkan di Turki dengan melakukan reformasi terhadap tiga bidang penting yaitu: Pertama, sekularisasi negara, pendidikan dan hukum serta melemahkan pusat-pusat kekuatan tradisional ulama yang sudah memiliki lembaga; Kedua, menghapus simbol-simbol religious yang kemudian diganti dengan

¹⁵*Ibid.*, h. 157-163.

¹⁶ Shakman, *Politics of Secularism*, h. 52

¹⁷Umut Azak, *Islam and Secularism in Turkey* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2010), h. 3.

¹⁸M. Hamdan Basyar, *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 54.

simbol-simbol peradaban Barat terutama Eropa; Ketiga, sekularisasi terhadap kehidupan Islam dan kehidupan sosial (Zurcher, 2003; Machmudi, 2013). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada tahun-tahun pertama penerapan sekularisme di Turki adalah dengan menghapuskan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah berbasis Islam tradisional serta pengadilkan agama.

Eksperimen Turki yang bermasalah dengan munculnya sekularisme juga memunculkan beberapa kontroversi seperti salah satunya adalah Kontroversi Hijab. Kontroversi jilbab dimulai pada tahun 1980an, ketika universitas-universitas Turki mulai mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya: mahasiswi yang mengenakan jilbab. Fenomena baru ini disebabkan oleh transformasi sosial yang terjadi di Turki. Pada dekade-dekade sebelumnya, keluarga-keluarga yang menyekolahkan putri mereka ke perguruan tinggi pada umumnya adalah keluarga-keluarga sekuler perkotaan yang budayanya tidak begitu memperhatikan aturan berpakaian yang konservatif seperti jilbab. Sementara itu, keluarga tradisional yang budayanya menerapkan jilbab kurang berminat untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anak perempuannya, yang pola umumnya adalah menikah segera setelah wajib belajar.¹⁹

D. Politik Di Era Turki Modern

Perubahan yang terjadi dari masa Dinasti Ottoman hingga saat ini, kehidupan politik di Turki mengalami banyak penyesuaian. Untuk menyelaraskan praktik pemerintahan dengan ideologi yang dianut negara, beberapa hal dihilangkan dan ditambahkan dalam peraturan yang mengatur tentang politik, sistem pemerintahan, pendirian partai politik dan keikutsertaannya dalam pemilu.

1. Militer dan Politik

Pengambil alihan militer pada tahun 1980 menyebabkan banyak pengamat, baik asing maupun Turki, menekan peran yang dimainkan oleh tentara dalam politik dan sejarah Turki. Penekanan pada peran militer dalam sejarah Turki dan politik, dari zaman Ottoman hingga saat ini, menunjukkan kontinuitas yang dapat mengarah pada asumsi bahwa tentara adalah sebuah lembaga yang tidak pernah mengubah pandangan dunianya, yang berdiri di atas masyarakat dan bertindak secara independen.²⁰ Salah satu peristiwa besar dalam sejarah Turki modern adalah dinetralkannya rezim lama militer dari politik dan kontradiksi antara pemerintah dan

¹⁹ Mustafa Akyol, *Turkey's Troubled Eksperiment With Secularism*, Lesson From Turke's Struggle to Balance democracy and Laiklik, <https://tcf.org/content/report/turkeys-troubled-experiment-secularism/> 25 April 2019, The Century Foundation.

²⁰ Ahmad, Feroz, *The Making of Modern Turkey*, (London: Routledge, 1993), h. 3.

militernya telah dihapus. Kedua lembaga telah jatuh ke tangan dari kelas yang sama, kelas menengah Turki, dan karena itu keduanya mampu mendukung reformasi untuk pertama kalinya.

Setelah Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 dan Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama, ia merasa posisinya masih belum aman. Ada beberapa pihak yang dianggap sebagai saingan yang harus disingkirkan, terutama dari pihak militer yang mampu menimbulkan ancaman serius. Pada 1926, ancaman ini telah dieliminasi dengan dipensiunkannya beberapa jenderal, seperti Kazim Karabekir, Ali Fuad Cebesoy, dan Refet Bele. Mereka dipaksa untuk meninggalkan militer dan didiskualifikasi dari politik selama masa kepemimpinan Atatürk.²¹

2. Perkembangan Politik dan Sistem Pemerintahan di Turki

Semenjak gagasan negara Islam dimentahkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan para pendukungnya karena dianggap mengabadikan keterbelakangan Turki. Mereka terus megusahakan Turki berubah menjadi negara modern yang dalam kata-kata Mustafa Kemal Atatürk, akan “hidup sebagai bangsa yang maju dan beradab di tengah-tengah peradaban kontemporer”. Bangsa tersebut haruslah menjadi sekular dan rasional, menekankan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern untuk menciptakan ekonomi industri modern. Untuk mewujudkan Turki yang modern seperti gambaran para Kemalis, kekuasaan politik harus disita dari tangan reaksioner dan konservatif. Salah satu cara yang ditempuh Atatürk adalah dengan mengontrol ulama dan tarekat sufi melalui berbagai cara. Misalnya, Atatürk menetapkan undang-undang mengenai sistem pendidikan yang akhirnya menjadi landasan penutuan madrasah dan pelimpahan urusan pendidikan pada kekuasaan kementerian pendidikan.

Atatürk berusaha membentuk negara Turki modern sebagai sebuah negara demokrasi. Tetapi sampai 1945 Atatürk tidak mau berhadapan dengan kelompok atau partai oposisi.²² Oleh karena itu, politik Atatürk lebih mengarah pada kekuasaan tunggal. Satu-satunya partai yang memonopoli kekuasaan politik di Turki adalah Partai Rakyat Republik atau *Cumruhiyet Halk Partisi (CHP)*. Dalam perkembangan politik Turki, terdapat berbagai usaha yang mengarah ke sistem multipartai.²³ Pada Juli 1945, Nuri Demirag seorang industrialis terkemuka di Istanbul mendirikan Partai Pembangunan Nasional atau *Milli Kalkinma Partisi (MKP)* yang

²¹*Ibid.*, h. 8-9.

²²Erik J Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. h. 217

²³ M.Hamdan Basyar, *Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 113.

resmi terdaftar pada 5 September 1945. Kemudian ada pula Partai Demokrat atau *Demokrat Parti (DP)* yang didirikan pada 7 Januari 1946. Kemunculan dua partai oposisi ini mendiring CHP melakukan kongres luar biasa pada Mei 1946 yang menghasilkan persetujuan adanya pemilu langsung dan penghapusan jabatan ketua partai permanen serta gelar *Mili Sef* (pimpinan nasional).

Puncak dari periode transisi politik di Turki terjadi dengan dilaksanakannya pemilu 14 Mei 1950. Pemilu pertama dengan sistem multipartai tersebut dimenangkan oleh pimpinan dan pendiri DP, Adnan Menderes dengan perolehan 53,3% suara. Menderes menjabat sebagai PM sampai 1960, ketika pihak militer Turki melakukan kudeta dan menguasai pemerintahan. Kudeta militer pada 1960 itu disusul dengan kudeta-kudeta selanjutnya pada 1971, 1980, dan 1997. Kudeta militer didasari oleh tanggung jawab kalangan militer sebagai “penjaga sekularisme” di Turki yang merasa perlu turun tangan untuk menyelamatkan ajaran Kemalisme Atatürk.²⁴ Kalangan militer memang mendapat keistimewaan berdasarkan hasil referendum November 1982. Mereka dapat membubarkan pemerintahan jika perlu demi menjada sekularisme di Turki.

Konstitusi Turki 1982 merupakan payung politik dan hukum bagi militer Turki untuk menguasai semua lembaga negara. Menurut Konstitusi tersebut, Kepala Negara adalah seorang presiden yang menjabat selama 7 tahun dan dipilih oleh parlemen. Sedangkan Kepala Pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang menjabat selama 5 tahun. Konstitusi tersebut kembali direferendum pada 2007, dengan perubahan yang menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatannya dipotong menjadi hanya 5 tahun namun dapat dipilih kembali pada masa jabatan kedua, pemilu diadakan setiap 4 tahun sekali, dan kuorum yang diperlukan di parlemen untuk memutuskan suatu undang-undang dikurangi menjadi 184 anggota parlemen.

Pada 2010, tepatnya 12 September 2010, Konstitusi Turki kembali direferendum, dengan 57,88% rakyat Turki menyatakan persetujuannya. Hal yang perlu digarisbawahi dari amandemen ini adalah pembatasan kekuasaan pengadilan militer dan penghapusan kekebalan hukum para pemimpin kudeta 1980. Amandemen ini juga menjamin persamaan gender dan perlindungan anak-anak, orang tua, serta penyandang difabel. Amandemen konstitusi ini mendapat kecaman dari tokoh oposisi dari CHP, Berhan Simsek, karena dianggap merusak tatanan sekular di Turki. Dia menyebutnya racun yang dibalut dengan coklat. “*Ini malah akan*

²⁴*Ibid.*, hlm. 120.

menjadikan semua cabang pemerintahan berada dalam satu tangan. Berarti Turki akan dikuasai oleh satu orang, seperti Saddam Husein, atau Hitler."²⁵

3. Kepolitikan AKP di Turki

Adalet ve Kalkınma Partisi dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sebagai *Justice and Development Party* (JDP) dan juga sering disingkat AKP. Namun, partai ini secara resmi menyebut dirinya AK Parti. Ak dalam Bahasa Turki berarti cahaya, murni, putih, bersih, dan tidak terkontaminasi. AKP menolak klaim pihak lain yang menyebutnya sebagai partai politik atau menyimpan agenda politik Islamis. AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif (*muhafazakarlara demokrat*) yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius. Strategi ini didasari oleh kecenderungan masyarakat yang semakin konservatif, karena dominasi politik sayap kanan dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak era Turgut Özal.²⁶

Selain itu, AKP memperlunak identitas dan agenda Islam setelah berkuasa karena tekanan dari militer dan birokrasi Kemalis. Partai ini harus mematuhi pedoman yang ketat rezim sekuler untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mempertahankan status hukumnya.²⁷ Kehadiran AKP sesungguhnya juga merupakan konsekuensi perjumpaan beberapa dekade antara Islam dan negara. Kendati menegaskan dirinya demokrat-konservatif, justru kalangan Islamis dan sekuleris menuduhnya sebagai kamufase (*takiye*). Kalangan Islamis khawatir kalau AKP semata-mata agen politik Barat. Tetapi, sebaliknya kalangan sekuler khawatir AKP menyimpan agenda hendak mendirikan negara Islam seperti Iran. Elite AKP selalu menolak pandangan-pandangan demikian. Dalam sebuah wawancara, Abdullah Gül misalnya, menggambarkan keunikan Turki yang tidak saja jembatan antara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Kaukasus, tetapi juga mayoritas Muslimnya yang mengedepankan "demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas".²⁸

KESIMPULAN

Pada periode modern, Turki tidak hanya mengalami perubahan dalam satu sistem saja tetapi terdapat beberapa perubahan yang diistilahkan dengan adanya tiga pembagian sistem

²⁵Pipiet Tri Noorastuti dan Denny Armandhanu, "Turki Amandemen Sistem Peradilan", [viva.co.id](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/177302-turki-amandemen-sistem-peradilan), diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/177302-turki-amandemen-sistem-peradilan>.

²⁶Çarkoglu, Ali dan Ersin Kalaycıoglu, *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009), h. 15.

²⁷Alfian, M. Alfian. 2012. "Fenomena Recep Tayyip Erdoğan dan Kepolitikan AKP di Turki". *Kajian Khusus*. <http://www.akbartandjunginstitute.org/images/pdf>.

²⁸*Ibid. Fenomena Recep Tayyip Erdoğan dan Kepolitikan AKP di Turki*

politik yaitu Turki Lama, Transisi, dan Turki Modern. setelah terpilihnya Mustafa Kemal Attaturk sebagai Presiden Turki, ia menghapuskan system kekhilafahan. Mustafa Kamal Attaturk sebagai pemimpin Turki mengadakan reformasi besar-besaran dalam tatanan kehidupan untuk menjadikan Turki sebagai negara sekuler yang bersifat modern. Pembaharuan yang dilakukan oleh presiden tersebut salah satunya adalah tentang sekularisme. Hal itu dikarenakan masuknya ide-ide barat seperti Westernisasi ke Turki, sehingga lahirlah pembaharuan ide-ide seperti sekularisme. Nasionalisme dan sekularisme membangkitkan kelompok reformis Turki, dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang lebih agresif dalam mengkaji sistem pemerintahan. Marjinalisasi Turki di kancah politik dunia pada akhir abad ke-19 memasuki abad ke-20 mendorong Kemal Atatürk untuk mengambil alih kekuasaan dan mengubah sistem pemerintahan dari Kerajaan Turki menjadi Republik Turki. Atatürk juga berusaha membentuk negara Turki modern sebagai sebuah negara demokrasi. Sehingga adanya perubahan pada tatanan politik dan pemisahan politik dengan agama atau sekularisme dimana suatu pemahaman atau ideologi bahwa sebuah institusi, badan, atau negara harus dipisahkan dari agama

DAFTAR PUSTAKA

- A. Baran Dural, *His Story: Mustafa Kemal and Turkish Revolution* (Lincoln: iUniverse, 2007), Ahmad, Feroz, *The Making of Modern Turkey*, (London: Routledge, 1993), h. 3.
- Alfian, M. Alfian. 2012. “Fenomena Recep Tayyip Erdoğan dan Kebijakan AKP di Turki”. *Kajian Khusus*. <http://www.akbartandjunginstitute.org/images/pdf>.
- Çarkoglu, Ali dan Ersin Kalaycıoglu. 2009. *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dankwart A. Rustow. 1991. “Political Parties in Turkey: An Overview”, dalam Metin Heper dan Jacob M. Landau (Eds.), *Political Parties and Democracy in Turkey*. London: I.B. Tauris & Co Ltd.
- Edward J. Erickson. 2013. *Mustafa Kemal Atatürk*, (London: Osprey Publishing.
- Erik J Zurcher. 2003. *Sejarah Modern Turki*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Guillermo O’Donnel et.al (ed). 1992. *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*. Cet. 1: Jakarta LP3ES.
- H.A. R. Gibb. 1989. “Atatürk, Mustafa Kemal”, dalam *The Encyclopedia of Islam*, I. Leiden: Koninklijke Brill.
- Harun Nasution. 1992. *Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet. IX:

Jakarta: Bulan Bintang,

M. Hamdan Basyar. 2015. *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI Press.

Mustafa Akyol, *Turkey's Troubled Eksperiment With Secularism*, Lesson From Turke's Struggle to Balance democracy and Laiklik, <https://tcf.org/content/report/turkeys-troubled-experiment-secularism/> 25 April 2019, The Century Foundation.

Niyazi Berkes. 1964. *Development of Secularism in Turkey*. MC. Gill University Press.

Pipiet Tri Noorastuti dan Denny Armandhanu, "Turki Amandemen Sistem Peradilan", [viva.co.id](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/177302-turki-amandemen-sistem-peradilan), diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/177302-turki-amandemen-sistem-peradilan>.

Umut Azak. 2010. *Islam and Secularism in Turkey*. London: I.B. Tauris & Co Ltd.